



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 93 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 68);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 68) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 93

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 93 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
GARUT NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

<i>Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023</i>	1

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD meliputi Perubahan :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023, Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023	2

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

<i>Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023</i>	3
--	---

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023	4
--	---

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023	5
--	---

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023	6
---	---

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023	7
--	---

Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 68);
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar PD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun

<i>Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023</i>	8

2023.

2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan

<i>Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023</i>	9
--	---

kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan

3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Semula dan Menjadi

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

<i>Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023</i>	10

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi Anggaran Program Renstra

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023	11
--	----

Tabel 2.1
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2023

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 1	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023 2	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023 3	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023 4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.844.566.761	52,72	3.081.240.791
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.867.300	25,44	8.871.400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.348.400	0,00	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.996.900	0,00	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.993.800	28,89	1.442.600
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.544.000	0,00	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.052.000	42,88	1.308.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.127.200	46,87	3.809.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.805.000	48,10	2.311.200
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.055.716.996	51,47	2.602.116.710
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.033.150.896	51,49	2.591.495.710
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	10.000.000	50,00	5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.566.100	44,73	5.621.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.064.300	24,93	1.262.400
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.064.300	24,93	1.262.400
Administrasi Umum Perangkat Daerah	282.530.115	66,73	188.519.500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.274.600	49,93	6.628.600

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.573.115	96,23	59.253.100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.996.900	49,88	2.492.400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.952.000	70,60	20.440.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.780.000	39,98	6.309.300
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.000.000	57,81	88.442.600
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.953.500	100,00	4.953.500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.424.300	77,97	85.320.000
Pengadaan Mebel	31.084.300	60,42	18.780.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.340.000	84,94	66.540.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.849.350	31,62	21.771.550
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.244.000	30,30	10.071.550
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.605.350	32,86	11.700.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.114.400	60,18	173.379.231
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8.250.000	35,96	2.967.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.000.000	42,31	74.043.231
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.630.000	26,34	2.800.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	94.234.400	99,29	93.569.000
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.208.577.000	44,43	3.202.686.726
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.397.051.400	51,00	2.550.398.826

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.606.542.900	56,48	907.362.150
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkadamelalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	3.183.525.000	42,06	1.339.023.476
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	47.487.000	28,74	13.647.000
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	153.416.400	29,88	45.846.000
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	123.161.500	83,26	102.541.500
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	121.314.200	99,72	120.978.700
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	134.704.800	15,59	21.000.000
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	26.899.600	0,00	0
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.749.617.800	37,28	652.287.900
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	487.418.400	36,49	177.849.500
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	40.276.800	40,97	16.503.200
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.221.922.600	37,48	457.935.200
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	61.907.800	0,00	-
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	61.907.800	0,00	0
JUMLAH	13.053.143.761	48,14	6.283.927.517

Sumber : Perubahan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023	14
--	----

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif Renstra Tahun 2023 terhadap realisasi APBD TA. 2023, dari total pagu indikatif Renstra Tahun 2023 sebesar Rp. 13.053.143.781,-, melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2023 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.283.927.517,- atau sebesar 48,14%.

2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENSTRA

Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RENSTRA dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian RENSTRA s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah 50,75% untuk target kinerja dan 23,69% untuk target anggaran.

Tabel 2.2
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program RENSTRA Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Sampai Triwulan II Tahun 2023

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	50	25,44
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	11,41
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	14,44
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	100	21,44
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57	23,43
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	24,05

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
	1	2
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50	24,71
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	24,71
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	50	25,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50	22,37
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50	12,46
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	50	12,46
Administrasi Umum Perangkat Daerah	50	32,47
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	24,97
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	48,12
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33	24,94
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50	35,30
Fasilitasi Kunjungan Tamu	50	19,99
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57	27,51
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50	50,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50	43,68
Pengadaan Mebel	50	30,21
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80	49,98
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50	15,81
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50	15,15
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50	16,43
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50	30,09

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
	1	2
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40	17,98
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42	21,16
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27	13,17
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	49,65
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	51,5	22,21
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	23,63
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	56	28,24
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkadamelalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	42	21,03
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	50	14,37
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	33	14,94
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	83	41,63
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	49,86
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	20	7,79
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	0	0,00
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100	18,64

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
	1	2
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	35	18,24
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	40	20,49
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	37	18,74
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	0	0,00
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	0	0,00
JUMLAH	50,75	23,69

Sumber : PERUBAHAN RENSTRA Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran
RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.263.325.554	47,38	6.283.927.517
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.054.748.554	50,89	3.081.240.791
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.870.200	22,82	8.871.400

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.348.400	0,00	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.999.800	0,00	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.993.800	28,89	1.442.600
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.544.000	0,00	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.052.000	42,88	1.308.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.127.200	46,87	3.809.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.805.000	48,10	2.311.200
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.265.898.789	49,41	2.602.116.710
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.243.332.689	49,42	2.591.495.710
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	10.000.000	50,00	5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.566.100	44,73	5.621.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.064.300	24,93	1.262.400
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.064.300	24,93	1.262.400
Administrasi Umum Perangkat Daerah	290.294.115	64,94	188.519.500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.274.600	49,93	6.628.600
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.573.115	96,23	59.253.100

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.996.900	49,88	2.492.400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.952.000	70,60	20.440.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.780.000	39,98	6.309.300
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.764.000	55,01	88.442.600
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.953.500	100,00	4.953.500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97.657.400	87,37	85.320.000
Pengadaan Mebel	31.084.300	60,42	18.780.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.573.100	99,95	66.540.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.849.350	31,62	21.771.550
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.244.000	30,30	10.071.550
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.605.350	32,86	11.700.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.114.400	60,18	173.379.231
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8.250.000	35,96	2.967.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.000.000	42,31	74.043.231
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.630.000	26,34	2.800.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	94.234.400	99,29	93.569.000

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.208.577.000	44,43	3.202.686.726
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.397.051.400	47,26	2.550.398.826
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.606.542.900	56,48	907.362.150
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkadamelalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa	3.183.525.000	42,06	1.339.023.476
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	47.487.000	28,74	13.647.000
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	153.416.400	29,88	45.846.000
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	123.161.500	83,26	102.541.500
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	121.314.200	99,72	120.978.700
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	134.704.800	15,59	21.000.000
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	26.899.600	0,00	0
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.749.617.800	37,28	652.287.900
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	487.418.400	36,49	177.849.500

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
Pengawasan atas Kepatuhan terhadapPelaksanaannPeraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	40.276.800	40,97	16.503.200
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.221.922.600	37,48	457.935.200
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	61.907.800	0,00	-
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	61.907.800	0,00	0

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan bidang urusan pemerintahan adalah 47,83 Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2023, capaian rata-rata RENJA Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 67% untuk target kinerja, dan 43,2% untuk target anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:

Tabel 2.4
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program
Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	67	43,2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	25	53
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	25
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	29
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100	43
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57	47
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	48
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50	51
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	51
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	50	50
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50	45
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75	25
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	50	25
Administrasi Umum Perangkat Daerah	50	67
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	50
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	96
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33	50

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50	71
Fasilitasi Kunjungan Tamu	50	40
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57	58
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50	78
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-
Pengadaan Mebel	50	60
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80	85
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50	32
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50	30
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50	33
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50	60
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40	36
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42	42
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27	26
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	99
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	77,5	40,75
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	80	51,2
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	56	56
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkadamelalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50	42

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	75	29
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	33	30
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	69	83
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	16
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	-	-
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.667	37
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	206	36
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100	41
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	60	37
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	-	-

Sumber : Renja Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2023 tersaji dalam Tabel 2.5 berikut.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023	25
--	----

Tabel 2.5.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1:05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100	100	100	100	100			
01.05.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)	100	100	100	100	100			
01.05.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	16	12	12	16	100			
01.05.01.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100	16	16	100	100			
01.05.01.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (Satpol PP)	12	100	100	12	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01.05.01.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan Sat. Pol. PP	10	12	12	12	100			
01.05.01.02.07	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	100	10	10	100	100			
01.05.01.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan Jumlah Pakaian Kerja Tertentu	200 dan 200	100	100	200 dan 200	200 dan 200			
01.05.01.05.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (Satpol PP)	100	200 dan 200	200 dan 200	100	100			
01.05.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	16	100	100	12	50			
01.05.01.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 dan 10	16	16	30 dan 10	25			
01.05.01.06.02	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	11 dan 30532	30 dan 10	30 dan 10	11 dan 30532	85			
01.05.01.06.05	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman	48	11 dan 30532	11 dan 30532	1860	100			
01.05.01.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	141	1860	1860	141	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01.05.01.06.09	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah TKK dan TKS yang mendapat asuransi	372	141	141	0	0			
01.05.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	100	100	100	100	100			
01.05.01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	5	5	5	0	0			
01.05.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	5	5	5	5	100			
01.05.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100	100	100	100	100			
01.05.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	12	100			
01.05.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Upah kerja dan Peralatan Kebersihan	12 dan 4	12	12	1	50			
01.05.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik sesuai peraturan perundang-undangan (Satpol PP)	100	100	100	100	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01.05.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan	5	5	5	5	100			
01.05.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan Jumlah pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional/lapangan	50 dan 45	50 dan 45	50 dan 45	50 dan 45	66			
01.05.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor Jumlah penataan interior, mabeulair sesuai dengan kebutuhan	1 dan 5	1 dan 5	1 dan 5	1	100			
01.05.01.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	15	15	15	15	100			
01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	85	85	85	85	100			
01.05.02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	85	85	85	85	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01.05.02.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kegiatan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1000/360	12	12	12	100			
01.05.02.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkadamelalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah penertiban dan pengamanan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	157/360	12	12	12	100			
01.05.02.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Kegiatan Trantibum dan Linmas	31	121	121	121	100			
01.05.02.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanganan Bencana	282	200 dan 60	200 dan 60	200 dan 60	38			
01.05.02.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan Apatur SatpolPP dan Linmas	70	40 dan 30	40 dan 30	40 dan 30	79			
01.05.02.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan	4	4	4	4	50			

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023	30
--	----

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01.05.02.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana Prasarana SatpolPP dan Linmas	227	215 dan 6	215 dan 6	215 dan 6	100			
01.05.02.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase Penegakan Perda dan Perkada	85	85	85	85	100			
01.05.02.02..01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	40	56	56	56	100			
01.05.02.02..02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadapPelaksanaannPeraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	12	84	84	84	100			
01.05.02.02..03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	12	292 dan 322	292 dan 322	292 dan 322	50			
01.05.02.03.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SatpIPP yang bersertifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	15	85	85	85	100			
01.05.02.03.01.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Aparatur PPNS yang mengikuti Bimtek Pengembangan karir	15	25	25	25	100			

Sumber : Evaluasi Renja Satpol PP Triwulan II Tahun 2023

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023	31
---	----

Tabel 2.5.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
01.05.01'	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100	100	100	100	100	100	300	3,00
01.05.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD Sesuai Ketentuan (Satpol PP)	100	100	100	100	100	100	300	3,00
01.05.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	2	16	16	16	100	2	34	17,00
01.05.01.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1					1	1	1,00
01.05.01.02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1					1	1	1,00
01.05.01.02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1					1	1	1,00
01.05.01.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1					1	1	1,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01.05.01.0 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7					7	7	1,00
01.05.01.0 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1					1	1	1,00
01.05.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100	100	100	100	100	100	300	3,00
01.05.01.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Satpol PP)	46	12	12	12	100	46	70	1,52
01.05.01.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12					12	12	1,00
01.05.01.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Sat. Pol. PP	12	12	12	12	100	12	36	3,00
01.05.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	100	100	100	100	100	100	300	3,00
01.05.01.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	400	200 dan 200	200 dan 200	200 dan 200	100	400	400	1,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01.05.01.0 5.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12					12	12	1,00
01.05.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Satpol PP)	100	100	100	100	100	100	300	3,00
01.05.01.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	12	12	12	100	1	25	25,00
01.05.01.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	30 dan 10	30 dan 10	30 dan 10	100	3	3	1,00
01.05.01.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3					3	3	1,00
01.05.01.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	11 dan 30532	11 dan 30532	11 dan 30532	100	2	2	1,00
01.05.01.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	1.860	1.860	1.860	100	12	3732	311,00
01.05.01.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14	141	141	141	100	14	296	21,14
01.05.01.0 6.08	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	-	-	-		12	12	1,00
01.05.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	100	100	100	100	100	100	300	3,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01.05.01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	-	-	-		5	5	1,00
01.05.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2					2	2	1,00
01.05.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	5	5	5	100	10	20	2,00
01.05.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100	100	100	100	100	100	300	3,00
01.05.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	12	100	12	36	3,00
01.05.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan upah kerja pegawai kebersihan	12	1	1	1	100	12	14	1,17
01.05.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	100	100	100	100	100	100	300	3,00
01.05.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	5	5	5	100	5	15	3,00
01.05.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	95	50 dan 45	50 dan 45	50 dan 45	100	95	95	1,00
01.05.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15					15	15	1,00
01.05.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	1	1	1	100	5	7	1,40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01.05.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	15	15	15	100	15	45	3,00
01.05.02'	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	50	85	85	85	100	50	220	4,40
		Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai ketentuan	100					100	100	1,00
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100					100	100	1,00
		Persentase satlinmas yang aktif	70					70	70	1,00
01.05.02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan dan penindakan penyelenggaraan gangguan Trantibum	6	85	85	85	100	6	176	29,33
		Jumlah kegiatan Satlinmas dalam penanganan Tibumtranmas	3					3	3	1,00
		Jumlah koordinasi dan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat	2					2	2	1,00
		Jumlah Pembinaan dan Penegakan disiplin Kode etik Lingkup Tugas Satpl PP dan Linmas	3					3	3	1,00
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung Tibumtranmas	100					100	100	1,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01.05.02.0 1.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	360	12	12	12	100	360	384	1,07
01.05.02.0 1.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkadamelalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	120	12	12	12	100	120	144	1,20
01.05.02.0 1.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12	121	121	121	100	12	254	21,17
01.05.02.0 1.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalamrangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	168	282	282	282	100	168	732	4,36
01.05.02.0 1.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	120	70	70	70	100	120	260	2,17

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01.05.02.0 1.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4	4	4	4	100	4	12	3,00
01.05.02.0 1.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Tersedia	100	215 dan 6	215 dan 6	215 dan 6	100	100	100	1,00
01.05.02.0 1.07	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2					2	2	1,00
01.05.02.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi Pengawasan dan Penanganan Perda dan Perkada	3	85	85	85	100	3	173	57,67
01.05.02.0 2.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	17	56	56	56	100	17	129	7,59
01.05.02.0 2.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	40	84	84	84	100	40	208	5,20
01.05.02.0 2.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	62	292 dan 322	292 dan 322	292 dan 322	100	62	62	1,00

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023	38
--	----

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01.05.02.03.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SatpIPP yang bersertifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2	85	85	85	100	2	172	86,00
01.05.02.03.01.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2	25	25	25	100	2	52	26,00

Sumber : Evaluasi Renstra Sampai Dengan Tahun 2023 TW II

Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.13.053.143.761,- sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp 6.283.927.517 atau mencapai 48,14%. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 6
Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023 sampai dengan triwulan II

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
01.05.01'	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.844.566.761	3.081.240.791	52,72
01.05.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.867.300	8.871.400	25,44
01.05.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.348.400	0	0,00
01.05.01.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.996.900	0	0,00
01.05.01.02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.993.800	1.442.600	28,89
01.05.01.02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.544.000	0	0,00
01.05.01.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.052.000	1.308.600	42,88
01.05.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.127.200	3.809.000	46,87
01.05.01.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.805.000	2.311.200	48,10
01.05.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.055.716.996	2.602.116.710	51,47
01.05.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.033.150.896	2.591.495.710	51,49
01.05.01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	10.000.000	5.000.000	50,00

01.05.01.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestern SKPD	12.566.100	5.621.000	44,73
01.05.01.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.064.300	1.262.400	24,93
01.05.01.05 .05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.064.300	1.262.400	24,93
01.05.01.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	282.530.115	188.519.500	66,73
01.05.01.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.274.600	6.628.600	49,93
01.05.01.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.573.115	59.253.100	96,23
01.05.01.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.996.900	2.492.400	49,88
01.05.01.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.952.000	20.440.000	70,60
01.05.01.06 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.780.000	6.309.300	39,98
01.05.01.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.000.000	88.442.600	57,81
01.05.01.06 .08	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.953.500	4.953.500	100,00
01.05.01.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.424.300	85.320.000	77,97
01.05.01.07 .05	Pengadaan Mebel	31.084.300	18.780.000	60,42
01.05.01.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.340.000	66.540.000	84,94
01.05.01.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.849.350	21.771.550	31,62
01.05.01.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.244.000	10.071.550	30,30
01.05.01.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.605.350	11.700.000	32,86
01.05.01.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.114.400	173.379.231	60,18
01.05.01.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8.250.000	2.967.000	35,96

01.05.01.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.000.000	74.043.231	42,31
01.05.01.09 .09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.630.000	2.800.000	26,34
01.05.01.09 .11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	94.234.400	93.569.000	99,29
01.05.02'	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.208.577.000	3.202.686.726	44,43
01.05.02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.397.051.400	2.550.398.826	51,00
01.05.02.01 .01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.606.542.900	907.362.150	56,48
01.05.02.01 .02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkadamelalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	3.183.525.000	1.339.023.476	42,06
01.05.02.01 .03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	47.487.000	13.647.000	28,74
01.05.02.01 .04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	153.416.400	45.846.000	29,88
01.05.02.01 .05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	123.161.500	102.541.500	83,26
01.05.02.01 .06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	121.314.200	120.978.700	99,72
01.05.02.01 .07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	134.704.800	21.000.000	15,59

01.05.02.01 .07	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	26.899.600	0	0,00
01.05.02.0 2.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.749.617.800	652.287.900	37,28
01.05.02.02 .01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	487.418.400	177.849.500	36,49
01.05.02.02 .02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadapPelaksanaannPeraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	40.276.800	16.503.200	40,97
01.05.02.02 .03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.221.922.600	457.935.200	37,48
01.05.02.0 3.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	61.907.800	-	0,00
01.05.02.03 .01.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	61.907.800	0	0,00
	JUMLAH	13.053.143.761	6.283.927.517	48,14

Sumber : Pengolahan Data & LRA Semester I

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 5 sub kegiatan yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan kegiatan tersebut masih berlangsung pada triwulan berikutnya Selain itu, terdapat 5 subkegiatan yang sudah mencapai target yang disebabkan karena kegiatan tersebut sudah sesuai dengan rencana.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan actor atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Pada **Tahun 2023 (TW II)** berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023	43
---	----

Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan/SKPD.

Selain itu, terkait perlu adanya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Adapun factor perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain :

- 1) Perlu adanya koordinasi yang lebih intens kepada para Kasi dan Kasubbag yang menangani kegiatan/sub kegiatan.
- 2) Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait scedule dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan .

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini :

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023	44

Tabel 2. 7
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023 TW II

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten (Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																												
		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				22.834.230.025	13.887.519.837	13.053.143.761	4.291.539.512											6.283.927.517								
	01.05.01'	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	%	100	10.524.387.522	100 6.175.957.793	100 5.844.566.761	25 1.088.852.786	25 1.992.388.005								50 3.081.240.791	0 53	150 9.257.198.584	150 88							
1	01.05.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD Sesuai Ketentuan (Satpol PP)	%	100	53.240.000	100 40.000.000	100 34.867.300	25 5.249.200	25 3.622.200								50 8.871.400	50 25	150 48.871.400	150 92							
	01.05.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen	2	5.500.000	16 40.000.000	2 4.348.400	0 0	- -								- -	- -	16 40.000.000	800 727	Satpol PP						
	01.05.01.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	4.950.000		1 4.996.900	0 0	- -								- -	- -	- -	- -	- -	Satpol PP					

01.05.01.02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5.500.000			1	4.993.800	1	1.442.600	-	-				1	1.442.600	100	29	1	1.442.600	100	26	Satpol PP
01.05.01.02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5.500.000			1	4.544.000	0	0	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	Satpol PP
01.05.01.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.410.000			1	3.052.000	1	958.600	-	350.000				1	1.308.600	100	43	1	1.308.600	100	38	Satpol PP
01.05.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	22.880.000			7	8.127.200	2	1.692.400	2	2.116.600				4	3.809.000	57	47	4	3.809.000	57	17	Satpol PP
01.05.01.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	5.500.000			1	4.805.000	1	1.155.600	-	1.155.600				1	2.311.200	100	48	1	2.311.200	100	42	Satpol PP
01.05.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%	100	7.241.008.617	100	5.092.411.342	100	5.055.716.996	25	947.864.836	25	1.654.251.874				50	2.602.116.710	50	51	150	7.694.528.052	150	106	
01.05.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Satpol PP)	Orang	46	7.107.583.127	12	5.067.411.342	46	5.033.150.896	46	940.166.836	-	1.651.328.874				46	2.591.495.710	100	51	58	7.658.907.052	126	108	Satpol PP

01.05.01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	60.500.000		12	10.000.000	3	5.000.000	3	-					6	5.000.000	50	50	6	5.000.000	50	8	Satpol PP
01.05.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Sat. Pol. PP	Laporan	12	72.925.490	12	25.000.000	12	12.566.100	3	2.698.000	3	2.923.000				6	5.621.000	50	45	18	30.621.000	150	42	Satpol PP
01.05.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	%	100	840.505.204	100	286.734.320	100	5.064.300	25	1.262.400	50	-				75	1.262.400	75	25	175	287.996.720	175	34	
01.05.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	400	829.505.204	200 dan 200	286.734.320	400	0	0	0	-	-				-	-	-	-	400	286.734.320	100	35	Satpol PP
01.05.01.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	11.000.000			12	5.064.300	3	1.262.400	3	-				6	1.262.400	50	25	6	1.262.400	50	11	Satpol PP
01.05.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Satpol PP)	%	100	555.133.345	100	297.120.460	100	282.530.115	25	86.089.900	25	102.429.600				50	188.519.500	50	67	150	485.639.960	150	87	
01.05.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	22.407.385	12	13.752.600	1	13.274.600	1	3.313.400	-	3.315.200				1	6.628.600	100	50	13	20.381.200	1.300	91	Satpol PP
01.05.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	87.195.539	30 dan 10	59.786.840	3	61.573.115	0	0	3	59.253.100				3	59.253.100	100	96	40	119.039.940	1.333	137	Satpol PP
01.05.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	16.500.000			3	4.996.900	1	2.492.400	-	-				1	2.492.400	33	50	1	2.492.400	33	15	Satpol PP
01.05.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	42.785.261	11 dan 30532	32.241.020	2	28.952.000	1	18.760.000	-	1.680.000				1	20.440.000	50	71	30.544	52.681.020	1.527.200	123	Satpol PP

01.05.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	37.096.400	1.860	16.500.000	12	15.780.000	3	2.798.000	3	3.511.300				6	6.309.300	50	40	1.866	22.809.300	15.550	61	Satpol PP
01.05.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	14	343.648.760	141	174.840.000	14	153.000.000	4	53.772.600	4	34.670.000				8	88.442.600	57	58	149	263.282.600	1.064	77	Satpol PP
01.05.01.06.08	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	12	5.500.000	-	-	12	4.953.500	3	4.953.500	3	-				6	4.953.500	50	100	6	4.953.500	50	90	Satpol PP
01.05.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	%	100	1.016.111.899	100	103.100.760	100	109.424.300	0	0	50	85.320.000				50	85.320.000	50	78	150	188.420.760	150	19	
01.05.01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	872.300.000	-	-	5	0	0	0	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	Satpol PP
01.05.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	55.000.000			2	31.084.300	0	0	1	18.780.000				1	18.780.000	50	60	1	18.780.000	50	34	Satpol PP
01.05.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	88.811.899	5	103.100.760	10	78.340.000	0	0	8	66.540.000				8	66.540.000	80	85	13	169.640.760	130	191	Satpol PP
01.05.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	%	100	89.506.237	100	56.785.711	100	68.849.350	25	10.547.450	25	11.224.100				50	21.771.550	50	32	150	78.557.261	150	88	
01.05.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	36.798.637	12	29.589.800	12	33.244.000	3	6.647.450	3	3.424.100				6	10.071.550	50	30	18	39.661.350	150	108	Satpol PP
01.05.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan upah kerja pegawai kebersihan	Laporan	12	52.707.600	1	27.195.911	12	35.605.350	3	3.900.000	3	7.800.000				6	11.700.000	50	33	7	38.895.911	58	74	Satpol PP
01.05.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	%	100	728.882.220	100	299.805.200	100	288.114.400	25	37.839.000	25	135.540.231				50	173.379.231	50	60	150	473.184.431	150	65	

	01.05.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	11.979.000	5	5.845.300	5	8.250.000	0	0	2	2.967.000					2	2.967.000	40	36	7	8.812.300	140	74	Satpol PP
	01.05.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	95	313.597.020	50 dan 45	253.395.100	95	175.000.000	15	27.039.000	25	47.004.231					40	74.043.231	42	42	110	327.438.331	116	104	Satpol PP
	01.05.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	13.200.000			15	10.630.000	3	2.800.000	1	-					4	2.800.000	27	26	4	2.800.000	27	21	Satpol PP
	01.05.01.09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	307.606.200	1	29.934.800	5	94.234.400	0	8.000.000	5	85.569.000					5	93.569.000	100	99	6	123.503.800	120	40	Satpol PP
	01.05.01.09.10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	82.500.000	15	10.630.000	15		0	-	-	-					-	-	-	-	15	10.630.000	100	13	Satpol PP
2	01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	%	50	745.305.550	85	7.711.562.044	50	185.069.300	0	20.600.000	-	81.941.500					-	102.541.500	-	55	85	7.814.103.544	170	1.048	
			Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat sesuai ketentuan	%	100	8.050.864.289			100	4.985.768.700	100	927.568.850	-	1.453.442.476					100	2.381.011.326	100	48	100	2.381.011.326	100	30	
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	%	100	806.397.664			100	1.749.617.800	100	142.457.900	-	509.830.000					100	652.287.900	100	37	100	652.287.900	100	81	
			Persentase satlinmas yang aktif	%	70	2.707.275.000			70	288.121.200	4	14.870.000	36	51.976.000					4	66.846.000	6	23	4	66.846.000	6	2	

01.05.02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan dan penindakan penyelenggaraan gangguan Trantibum	Jenis	6	7.454.732.016	85	5.418.892.526	6	4.816.967.500	6	850.011.850	-	1.396.373.776	6	2.246.385.626	100	47	91	7.665.278.152	1.517	103		
		Jumlah kegiatan Satlinmas dalam penanganan Tibumtranmas	Jenis	3	287.275.000			3	153.416.400	3	14.870.000	-	30.976.000	3	45.846.000	100	30	3	45.846.000	100	16		
		Jumlah koordinasi dan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan dan Perlindungan Masyarakat	Jenis	2	596.132.273			2	168.801.200	2	77.557.000	-	57.068.700	2	134.625.700	100	80	2	134.625.700	100	23		
		Jumlah Pembinaan dan Penegakan disiplin Kode etik Lingkup Tugas Satpl PP dan Linmas	Jenis	3	418.605.550			3	123.161.500	3	20.600.000	-	81.941.500	3	102.541.500	100	83	3	102.541.500	100	24		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung Tibumtranmas	%	100	2.420.000.000			100	134.704.800	0	-	16	21.000.000	-	21.000.000	-	16	-	21.000.000	-	1		
01.05.02.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	Kasus	360	2.445.833.987	12	1.485.104.520	360	1.606.542.900	36	314.850.350	164	592.511.800	200	907.362.150	56	56	212	2.392.466.670	59	98	Satpol PP	

01.05.02.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkadamelalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	120	4.810.420.07	12	2.739.633.956	120	3.183.525.000	40	535.161.500	20	803.861.976	60	1.339.023.476	50	42	72	4.078.657.432	60	85	Satpol PP
01.05.02.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	12	181.515.125	121	68.187.000	12	47.487.000	3	13.557.000	6	90.000	9	13.647.000	75	29	130	81.834.000	1.083	45	Satpol PP
01.05.02.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	168	287.275.000	282	145.000.000	168	153.416.400	56	14.870.000	-	30.976.000	56	45.846.000	33	30	338	190.846.000	201	66	Satpol PP
01.05.02.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	120	418.605.550	70	151.345.500	120	123.161.500	30	20.600.000	53	81.941.500	83	102.541.500	69	83	153	253.887.000	128	61	Satpol PP
01.05.02.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	4	414.617.148	4	142.014.300	4	121.314.200	2	64.000.000	2	56.978.700	4	120.978.700	100	100	8	262.993.000	200	63	Satpol PP

01.05.02.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	100	2.420.000.000	215 dan 6	687.607.250	100	134.704.800	0	0	-	21.000.000	-	21.000.000	-	16	221	708.607.250	221	29	Satpol PP
01.05.02.01.07	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	2	198.478.022			2	26.899.600	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Satpol PP
01.05.02.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi Pengawasan dan Penanganan Perda dan Perkada	Jenis	3	806.397.664	85	2.248.712.568	3	1.749.617.800	3	142.457.900	47	509.830.000	50	652.287.900	1.667	37	135	2.901.000.468	4.500	360	
01.05.02.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	17	234.256.000	56	852.321.198	17	487.418.400	4	28.531.500	31	149.318.000	35	177.849.500	206	36	91	1.030.170.698	535	440	Satpol PP
01.05.02.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	40	87.752.830	84	64.221.000	40	40.276.800	10	11.037.200	30	5.466.000	40	16.503.200	100	41	124	80.724.200	310	92	Satpol PP
01.05.02.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	62	484.388.834	292 dan 322	1.332.170.370	62	1.221.922.600	14	102.889.200	23	355.046.000	37	457.935.200	60	37	701	1.790.105.570	1.131	370	Satpol PP

01.05.02.03.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SatpolPP yang bersertifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Orang	2	326.700.000	85	43.956.950	2	61.907.800	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	43.956.950	4.250	13	
01.05.02.03.01.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	2	326.700.000	25	43.956.950	2	61.907.800	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	25	43.956.950	1.250	13	Satpol PP

Sumber : Lap. Evaluasi renja, 2023 Triwulan II

2.2.3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) & Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Proyek Strategis Nasional (Stunting)

Adapun dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023 beserta realisasi capaian SPM serta program yang mendukung pencapaian SPM disajikan pada tabel 2.8

Tabel 2.8
Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian SPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM 2022	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
5. SPM TRANTIBUMLINMAS								
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	16.Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.3. Menggalakan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Sumber: Data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capain SPM telah dapat mencapai target. Walaupun pada Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten tidak ada warga negara yang terkena dampak akibat dari Penegakan Perda dan Perkada, namun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar

Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa apabila tidak ada masyarakat yang terdampak karena penegakan Perda & Perkada berarti 100%.

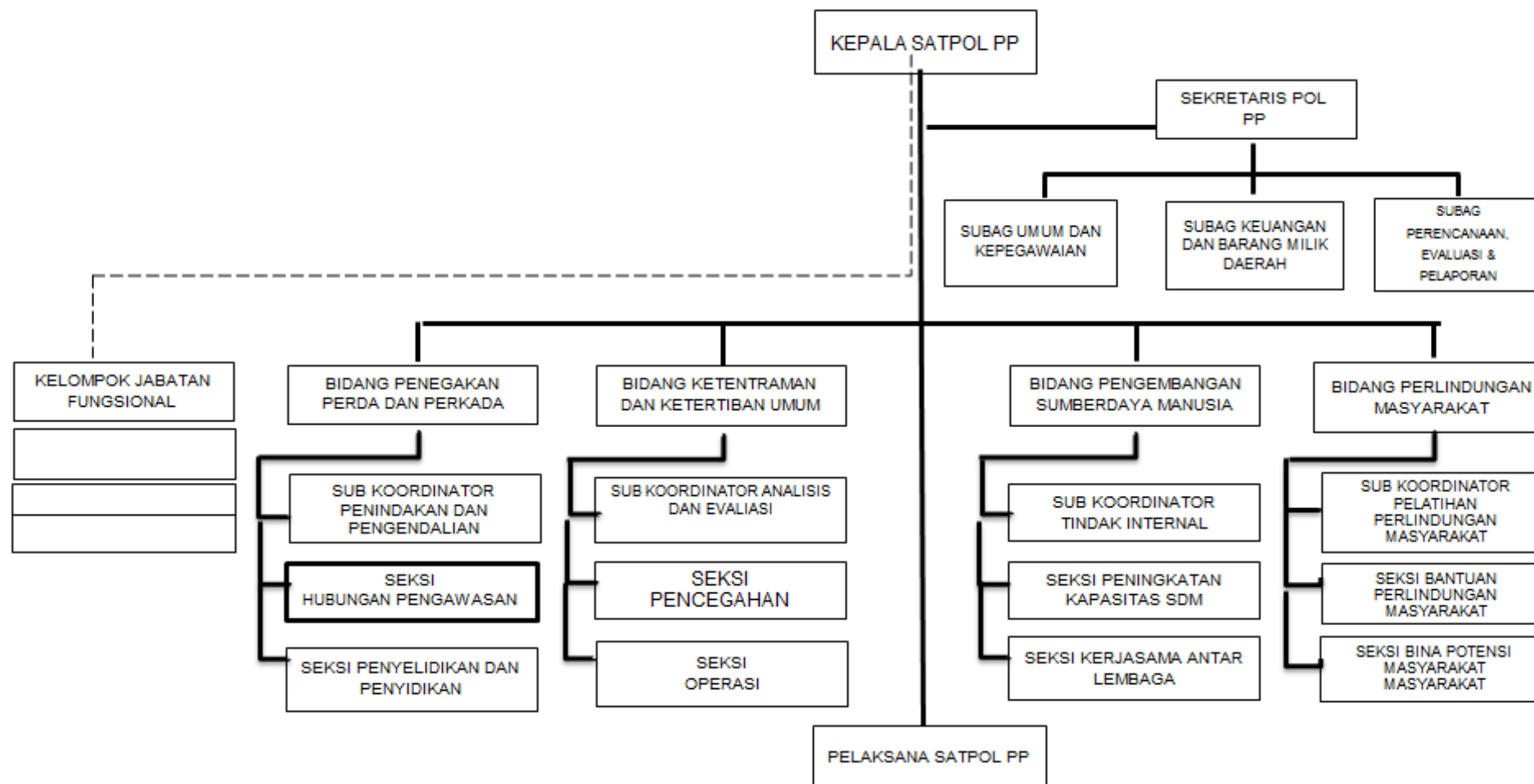
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Adapun tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

<i>Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023</i>	55
--	----

Bagan 2. 1 Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut



Sumber: Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten (Peraturan Bupati Garut Nomor 268 Tahun 2021).

Secara rinci tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- a) Menegakkan Perda dan Perkada;
- b) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman;
- c) Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- b) pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- c) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
- e) pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018)

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.9 sebagai berikut :

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023	57

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Garut
Kabupaten Garut

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2022	2023 (TW2)	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)
1	Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	√	√	54%	65%	70%	73%	65%	70%	73%	
2	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	√	√	80%	90%	95%	100%	90%	74%	100%	
3	Rasio Linmas Per 10.000 penduduk	√	√	39 orang	40 orang	45 orang	50 orang	40 orang	35 orang	50 orang	
4	Nilai Sakip	-	√	BB	BB	BB	A	BB	BB	A	

Sumber Data : Perubahan Renstra Tahun 2019-2024

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023	58
---	----

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut adalah menyangkut ketenteraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Garut terkait permasalahan-permasalahan seperti perizinan, pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah dan unjuk rasa. Pada Tahun 2023, Kabupaten Garut dihadapkan dengan pelaksanaan pesta demokrasi yaitu Pilkada serentak dan Persiapan Pemilu Tahun 2024.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a. Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum belum optimal;
- b. Penegakan Perda belum optimal;
- c. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi peraturan daerah masih belum optimal;
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP.

Untuk itu, sebagai salah satu OPD yang membidangi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya meliputi : ketenteraman, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang diamanatkan dalam pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di rubah dengan undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas fungsi yang semakin berat dan kompleks dalam upaya mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Kondisi tersebut seyogyanya harus dibarengi dengan kapasitas kelembagaan yang utuh, dukungan sumber daya yang mumpuni dan anggaran yang memadai agar Satpol PP Kab. Garut dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam rangka menegakan

peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di atas, untuk mencapai target yang telah ditetapkan, di atas terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi, yaitu:

- (1) Pemahaman dan Ketaatan masyarakat terhadap Penegakan Perda masih rendah;
- (2) Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban di lingkungannya;
- (3) Sumber daya Satpol PP dilihat dari segi kualitas dan kuantitas belum sebanding dengan jumlah penduduk;
- (4) Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD terkait dan Instansi Vertikal lainnya dalam Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2.5. Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam rangka *review* terhadap Rancangan Perubahan RKPD maka dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023	60
--	----

Proses review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada perubahan Renja dengan arahan Rancangan Perubahan RKPD. Proses perbandingan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Satpol PP Tahun 2023 menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 1 bidang urusan yaitu bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, serta bidang penelitian dan pengembangan;
2. Jumlah program antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 2 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
3. Jumlah kegiatan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 10 kegiatan, yang terdiri dari 38 sub kegiatan;
4. Kebutuhan dana/pagu Indikatif yang tercantum pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 13.263.325.563,- telah sesuai dengan kebutuhan dana/pagu indikatif hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 13.263.325.563,-. Secara kronologis, pagu indikatif Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023 sebelum perubahan mencapai sebesar Rp. 21.384.606.840,- dan mengalami penyesuaian sebesar Rp. 8.121.281.277,-, dan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023 mencapai sebesar Rp. 13.263.325.563 atau berkurang

<i>Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023</i>	61
--	----

Rp.818.219.571,- dari anggaran pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 14.081.545.134.

5. Sesuai Hasil Analisis Kebutuhan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Satpol PP Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan indikator kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.10
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

Lembar 1 dari 9

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	05	001				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100 %	6.054.748.554	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100 %	6.054.748.554	
1	05	001	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD Sesuai Ketentuan (Satpol PP)	100 %	38.870.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD Sesuai Ketentuan (Satpol PP)	100 %	38.870.200	
1	05	001	2.01	001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.348.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.348.400	
1	05	001	2.01	002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.999.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.999.800	
1	05	001	2.01	003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.993.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.993.800	
1	05	001	2.01	004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.544.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.544.000	

No					Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	05	001	2.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.052.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.052.000	
1	05	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	8.127.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	8.127.200	
1	05	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.805.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.805.000	
1	05	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100 %	5.265.898.789	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100 %	5.265.898.789	
1	05	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang	5.243.332.689	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang	5.243.332.689	
1	05	001	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	10.000.000	

No					Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	05	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12.566.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12.566.100	
1	05	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Aparatur dengan Kondisi Baik (Satpol PP)	100 %	5.064.300	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Aparatur dengan Kondisi Baik (Satpol PP)	100 %	5.064.300	
1	05	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	400 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	400 Paket	-	
1	05	001	2.05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	5.064.300	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	5.064.300	
1	05	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Satpol PP)	100 %	290.294.115	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Satpol PP)	100 %	290.294.115	
1	05	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.274.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.274.600	
1	05	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	61.573.115	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	61.573.115	

No					Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	05	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	4.996.900	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	4.996.900	
1	05	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	28.952.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	28.952.000	
1	05	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.780.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.780.000	
1	05	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	160.764.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	160.764.000	
1	05	001	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	4.953.500	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	4.953.500	
1	05	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	100 %	97.657.400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	100 %	97.657.400	
1	05	001	2.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	-	

No					Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	05	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	31.084.300	Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	31.084.300	
1	05	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	66.573.100	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	66.573.100	
1	05	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100 %	68.849.350	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100 %	68.849.350	
1	05	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.244.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.244.000	
1	05	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	35.605.350	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	35.605.350	
1	05	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Aparatur Dengan Kondisi Baik Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Satpol PP)	100 %	288.114.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Aparatur Dengan Kondisi Baik Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Satpol PP)	100 %	288.114.400	

No					Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	05	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	8.250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	8.250.000	
1	05	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	95 Unit	175.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	95 Unit	175.000.000	
1	05	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.630.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.630.000	
1	05	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	94.234.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	94.234.400	
1	05	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	-	
1	05	002			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	50 %	7.208.577.000	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	50 %	7.208.577.000	
							Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai ketentuan	100 %				Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai ketentuan	100 %		

No					Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
							Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %		
							Persentase satlinmas yang aktif	70 %				Persentase satlinmas yang aktif	70 %		
1	05	002	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Jenis	5.397.051.400	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Jenis	5.397.051.400			
						Jumlah kegiatan pencegahan dan penindakan penyelenggaraan gangguan Trantibum	6 Jenis			Jumlah kegiatan pencegahan dan penindakan penyelenggaraan gangguan Trantibum	6 Jenis				
						Persentase SATPOL PP yang bersertifikasi	100 %			Persentase SATPOL PP yang bersertifikasi	100 %				
1	05	002	2.01	001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	360 Kasus	1.606.542.900	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	360 Kasus	1.606.542.900	
1	05	002	2.01	002	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	120 Kasus	3.183.525.000	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	120 Kasus	3.183.525.000	

No					Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	05	002	2.01	003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	47.487.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	47.487.000	
1	05	002	2.01	004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	168 Dokumen	153.416.400	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	168 Dokumen	153.416.400	
1	05	002	2.01	005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	120 Orang	123.161.500	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	120 Orang	123.161.500	
1	05	002	2.01	006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen	121.314.200	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen	121.314.200	
1	05	002	2.01	007	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	2006 Unit	134.704.800	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	2006 Unit	134.704.800	
1	05	002	2.01	009	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	26899600	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	26899600	

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023	70
--	----

No					Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	05	002	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah kegiatan sosialisasi, Pengawasan dan Penanganan Perda dan Perkada	3 Jenis	1.749.617.800	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah kegiatan sosialisasi, Pengawasan dan Penanganan Perda dan Perkada	3 Jenis	1.749.617.800	
1	05	002	2.02	001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	56 Laporan	487.418.400	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	56 Laporan	487.418.400	
1	05	002	2.02	002	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	40 Laporan	40.276.800	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	40 Laporan	40.276.800	
1	05	002	2.02	003	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	150 Laporan	1221922600	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	150 Laporan	1,222E+09	
1	05	002	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Jumlah Aparatur SatpIPP yang bersertifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	30 Orang	61.907.800	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Jumlah Aparatur SatpIPP yang bersertifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	30 Orang	61.907.800	
1	05	002	2.03	001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	10 Laporan	61.907.800	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	10 Laporan	61.907.800	
									13.263.325.554					13.263.325.554	

Sumber : Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023	71
---	----

Tabel 2. 11
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023

No	Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2022	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Satuan Polisi Pamong Praja							21.384.606.840	14.081.545.134	13.263.325.563								22.874.353.624	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							21.384.606.840	14.081.545.134	13.263.325.563								22.874.353.624	
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							21.309.606.840	14.081.545.134	13.263.325.563								22.874.353.624	
1	1051	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100% n/aPredikat		%	100 %	100 %	9.567.625.020	6.154.345.134	6.054.748.563							100% APredikat	10.564.511.121	
1	05101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)	-		%	100 %	100 %	48.400.000	34.867.300	38.870.200			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenteraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	53.240.000		
1	05101	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	4.348.400	4.348.400	- Kab. Garut, Tarong Kidul, Sukagalih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	5.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000	4.996.900	8.999.800	- Kab. Garut, Tarong Kidul, Sukagalih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	4.950.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	4.993.800	4.993.800	- Kab. Garut, Tarong Kidul, Sukagalih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	5.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	4.544.000	4.544.000	- Kab. Garut, Tarong Kidul, Sukagalih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	5.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	-	%	%	100 %	100 %	6.582.735.106	5.365.495.369	5.265.898.798			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretariat Satpol PP	-	7.301.508.617	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang	46 Orang	6.497.735.106	5.342.929.269	5.243.332.698	- Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretariat Satpol PP	46 orang	7.168.083.127	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000	10.000.000	10.000.000	- Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretariat Satpol PP	12 laporan	60.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12.566.100	12.566.100	- Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sekretariat Satpol PP	12 laporan	72.925.490	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	-	%	%	100 %	100 %	764.095.640	5.064.300	5.064.300			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretariat Satpol PP	-	840.505.204		
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				400 Paket	400 Paket	754.095.640	-	-	-	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretariat Satpol PP	400 paket	829.505.204	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	5.064.300	5.064.300	-	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretariat Satpol PP	12 dokumen	11.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (Satpol PP)	-	%	%	100 %	100 %	504.666.678	282.530.115	290.294.115			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretariat Satpol PP	-	557.637.325		

						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	38.895.692	28.952.000	28.952.000	- Kab. Garut, Tarong Kidul, Sukagalih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretariat Satpol PP	2 paket	42.785.261	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	33.724.000	15.780.000	15.780.000	- Kab. Garut, Tarong Kidul, Sukagalih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretariat Satpol PP	12 laporan	39.596.400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	14 Laporan	312.407.964	153.000.000	160.764.000	- Kab. Garut, Tarong Kidul, Sukagalih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretariat Satpol PP	14 laporan	343.649.760	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	206	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000	4.953.500	4.953.500	- Kab. Garut, Tarong Kidul, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretariat Satpol PP	12 dokumen	5.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	80.738.090	78.340.000	66.573.100	- Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretariat Satpol PP	10 unit	80.738.090	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	-	%	%	100 %	100 %	81.369.306	68.849.350	68.849.350			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretariat Satpol PP	-	89.506.237	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	33.453.306	33.244.000	33.244.000	- Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretariat Satpol PP	12 laporan	36.798.637,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	47.916.000	35.605.350	35.605.350	- Kab. Garut, Semau Kecamatan, Semau Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretariat Satpol PP	12 laporan	52.707.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparaturnya dengan kondisi baik sesuai peraturan perundang-undangan (Satpol PP)	-	%	%	100 %	100 %	662.620.200	288.114.400	288.114.400			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	-	-	728.882.220	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	10.890.000	8.250.000	8.250.000	- Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	-	5 unit	11.979.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				95 Unit	95 Unit	285.088.200	175.000.000	175.000.000	- Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	-	95 unit	313.597.020	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	12.000.000	10.630.000	10.630.000	- Kab. Garut, Tarong Kidul, Sukagalih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	-	15 unit	13.200.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	279.642.000	94.234.400	94.234.400	- Kab. Garut, Tarong Kidul, Sukagalih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	-	5 unit	307.606.200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	209	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	75.000.000	-	-	- Kab. Garut, Tarong Kidul, Sukagalih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	-	15 unit	82.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai ketentuan. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan Persentase penanganan gangguan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat Presentase Satlinmas yang Aktif	% % % %		% % %	50 % 100 % 100 % 70 %	50 % 100 % 100 % 70 %	11.741.981.820	7.927.200.000	7.208.577.000					100% 100% 70% 100% 50%	12.309.842.503		
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pencegahan dan penindakan Penyelenggaraan gangguan trantibum Jumlah Kegiatan Satlinmas dalam Penanganan Tibumtranmas Jumlah koordinasi dan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan Trantibum dan Perlindungan masyarakat Jumlah Pembinaan dan Penegakan disiplin Kode etik Lingkup Tugas Satpl PP dan Linmas Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung Tibumtranmas	% % % %		% % %	6 Jenis 3 Jenis 2 Jenis 3 Jenis 100 %	6 Jenis 3 Jenis 2 Jenis 3 Jenis 100 %	10.711.893.035	5.904.084.500	5.397.051.400			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenteraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum	6 Jenis 3 Jenis 2 Jenis 3 Jenis 100 %	11.176.744.839	
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																	

						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				360 kasus	360 kasus	2.223.485.443	1.702.598.300	1.606.542.900	- Kab. Garut, Tarong Kidul, Suka galih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenteraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum	360 kasus	2.445.833.987,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	201	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				120 kasus	120 kasus	4.373.109.097	3.271.699.000	3.183.525.000	- Kab. Garut, Tarong Kidul, Suka galih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenteraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum	120 kasus	4.810.420.007,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	201	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				12 dokumen	12 dokumen	165.013.750	73.076.000	47.487.000	- Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenteraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum	12 dokumen	181.515.125,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	201	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum																

						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				168 dokumen	168 dokumen	287.375.000	222.629.000	153.416.400	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenteraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum	1 dokumen	287.275.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	201	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																
						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				120 Orang	64 orang	380.550.500	175.282.400	123.161.500	- Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenteraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum	64 orang	418.605.550,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	201	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				4 Dokumen	4 Dokumen	376.924.680	188.263.000	121.314.200	- Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenteraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum	4 dokumen	414.617.148,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	201	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				2006 Unit	106 unit	2.725.000.000	243.637.200	134.704.800	- Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenteraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum	106 unit	2.420.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				40 Laporan	40 Laporan	79.775.300	65.708.800	40.276.800	- Kab. Garut, Tarong Kidul, Sukagalih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum	40 laporan	87.752.830,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				62 Laporan	62 Laporan	440.353.485	1.342.722.000	1.221.922.600	- Kab. Garut, Tarong Kidul, Sukagalih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum	62 laporan	484.388.834,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Jumlah Aparatur SatpolPP yang bersertifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	-			3 Orang	3 Orang	297.000.000	98.396.700	61.907.800			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Aparatur Satpol PP	3 Orang	326.700.000,00	
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																	

						Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				10 Laporan	10 Laporan	297.000.000	98.396.700	61.907.800	- Kab. Garut, Tarong Kidul, Sukagalih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Aparatur Satpol PP	10 Laporan	326.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
										J U M L A H		21.309.606.840	14.081.545.134	13.263.325.563						22.874.350.643		

Sumber : Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mepedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam

<i>Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023</i>	89
--	----

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera "Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;

4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
 - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian,

industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;

PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;

PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;

PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kesatu yaitu Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan Berbudaya. Dari misi I RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut masuk kedalam sasaran ke 8 yaitu : Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum, Kesadaran Politik dan Hukum.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan Kecamatan/SKPD adalah PPD 2 yaitu Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut adalah Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, melaksanakan fungsi menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023	93
--	----

Garut Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2024 yaitu:

“ Terwujudnya Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat “ dengan indikator :

- a. Persentase Penanganan Ketenteraman dan ketertiban Umum;
- b. Persentase Penegakan Perda dan Perkada;
- c. Rasio Linmas Per 10.000 Orang Penduduk;
- d. Nilai Sakip

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah SKPD Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat, dengan indikator:
 - a. Persentase Penanganan Ketenteraman dan ketertiban Umum;
 - b. Persentase Penegakan Perda dan Perkada;
 - c. Rasio Linmas Per 10.000 Orang Penduduk.
2. Meningkatnya kinerja aparatur Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dengan indikator:
 - a. Nilai Sakip

Adapun tujuan, sasaran dan indikator Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut dapat dilihat pada tabel berikut :

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023	94

Tabel 3. 1
Tujuan, sasaran dan indikator kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Indeks Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan Ketenteraman dan ketertiban Umum	70%
				Persentase Penegakan Perda dan Perkada	95%
				Rasio Linmas Per 10.000 Orang Penduduk	45 orang
			Meningkatnya kinerja aparatur Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Nilai Sakip	BB

Sumber : Pengolahan Data Perubahan Renstra Satpol PP Tahun 2019-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuatakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuatakhirian Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Substansi pada Perubahan Renja Tahun 2023 diantaranya yaitu adanya penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/subkegiatan; perubahan pagu program, kegiatan atau subkegiatan, serta perubahan indikator dan target indikator program, kegiatan atau subkegiatan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran Renstra tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA
Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut	2	10	38	13.257.179.426,-

Sumber : Hasil Pengolahan data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dikelola dalam SIPD.

Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Satpol PP Kab. Garut Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah bidang urusan pemerintahan sebanyak 1 bidang urusan yaitu bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- b. Jumlah program sebanyak 2 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Jumlah kegiatan sebanyak 10 kegiatan, yaitu :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 8. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 10. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
- d. Jumlah sub kegiatan sebanyak 38 sub kegiatan, diantaranya :
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
 10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 11. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 15. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 16. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 18. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 19. Pengadaan Mebel
 20. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
25. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
26. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
27. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
28. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkadamelalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
29. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
30. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalamrangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
31. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
32. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
33. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
34. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
35. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
36. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
37. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
38. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 13.263.325.563,- dengan kronologis dari pagu indikatif pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp.21.384.606.840,- mengalami penyesuaian sebesar Rp. 8.121.281.277,- pada APBD Murni

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023	98

Tahun 2023 menjadi Rp.14.081.545.134,- dan pada Perubahan Renja Tahun 2023 kembali mengalami penyesuaian sebesar Rp. 818.219.571,- menjadi sebesar Rp. 13.263.325.563,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut sebesar Rp. 11.785.325.563,- dan anggaran yang bersumber dari anggaran DBHCHT sebesar Rp. 1.478.000.000,-. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tersaji pada tabel berikut:

<i>Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023</i>	99

Tabel 3.3
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023

Unit Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah							
1																						
1	5													14.081.54	13.263.32				22.874.350.			
														5.134	5.563				643			
1	5	1												6.154.345	6.054.748				10.564.508.			
														.134	.563				140			
1	5	1	2.0											34.867.30	38.870.20				53.240.000			
			1											0	0				0			
1	5	1	2.0	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	4.348.400	4.348.400	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100%	5.500.000
1	5	1	2.0	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100%	100%	1 Dokumen dan 1 Laporan	1 Dokumen dan 1 Laporan	100%	100%	4.996.900	8.999.800	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4.950.000

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023	100
--	-----

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target						
1						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	5	1	2.01	3	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100%	100%	1 Dokumen dan 1 Laporan	1 Dokumen dan 1 Laporan	100%	100%	4.993.800	4.993.800	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100%	5.500.000
1	5	1	2.01	4	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100%	100%	1 Dokumen dan 1 Laporan	1 Dokumen dan 1 Laporan	100%	100%	4.544.000	4.544.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100%	5.500.000
1	5	1	2.01	5	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100%	100%	1 Dokumen dan 1 Laporan	1 Dokumen dan 1 Laporan	100%	100%	3.052.000	3.052.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100%	3.410.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum			Sesudah			Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	5	1	2.01	6	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100%	100%	7 Laporan	7 Laporan	100%	100%	8.127.200	8.127.200	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100%	22.880.000
1	5	1	2.01	7	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	4.805.000	4.805.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100%	5.500.000
1	5	1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5.365.495.369	5.265.898.798				7.301.508.617	
1	5	1	2.02	1	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100%	100%	46 Orang	46 Orang	100%	100%	5.342.929.269	5.243.332.698	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100%	7.168.083.127

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
											Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur
1																						
1	5	1	2.0 6	2	1 4	URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	5	1	2.0 6	3	1 5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	100 %	3 Pak et	3 Pake t	100 %	100 %	61.573.115	61.573.11 5	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100 %	87.195.539
1	5	1	2.0 6	5	1 6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	100 %	3 Pak et	3 Pake t	100 %	100 %	4.996.900	4.996.900	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100 %	16.500.000
1	5	1	2.0 6	8	1 7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	100 %	2 Pak et	2 Pake t	100 %	100 %	28.952.000	28.952.00 0	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100 %	42.785.261
1	5	1	2.0 6	8	1 7	Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	100 %	12 La poran	12 Lap oran	100 %	100 %	15.780.000	15.780.00 0	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100 %	39.596.400

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	5	1	2.0	9	1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100%	100%	14 Laporan	14 Laporan	100%	100%	153.000.000	160.764.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100%	343.649.760
1	5	1	2.0	1	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	100%	4.953.500	4.953.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100%	5.500.000
1	5	1	2.0			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										109.424.300	97.657.400					993.231.518
1	5	1	2.0	2	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100%	100%	5 Unit	5 Unit	100%	100%	-	-		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100%	857.493.428

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	5	1	2.07	5	2	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100%	100%	2 Unit	2 Unit	100%	100%	31.084.300	31.084.300	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100%	55.000.000
1	5	1	2.07	6	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100%	100%	10 Unit	10 Unit	100%	100%	78.340.000	66.573.100	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100%	80.738.090
1	5	1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											68.849.350	68.849.350				89.506.236
1	5	1	2.08	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100%	100%	12 Laporan		100%	100%	33.244.000	33.244.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100%	36.798.636

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum			Sesudah			Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1																						
1	5	1	2.08	4	24	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	5	1	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
1	5	1	2.09	1	25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Aparatur dengan Kondisi Baik (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100%	100%	5 Unit	5 Unit	100%	100%	8.250.000	8.250.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100%	11.979.000
1	5	1	2.09	2	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Aparatur dengan Kondisi Baik (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100%	100%	95 Unit	95 Unit	100%	100%	175.000.000	175.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100%	313.597.020

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1																						
1	5	1	2.09	6	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Aparatur dengan Kondisi Baik (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100%	100%	15 Unit	15 Unit	100%	100%	10.630.000	10.630.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100%	13.200.000
1	5	1	2.09	9	2	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Aparatur dengan Kondisi Baik (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100%	100%	5 Unit	5 Unit	100%	100%	94.234.400	94.234.400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100%	307.606.200
1	5	1	2.09	10	2	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Aparatur	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100%	100%	15 Unit	15 Unit	100%	100%	-	-		Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	82.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
	Bangunan Lainnya	(Satpol PP)	Dipelihara/Direhabilitasi	dengan Kondisi Baik (Satpol PP)											(Satpol PP)							
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											12.309.842.503						
1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											7.927.200.000	11.176.744.839					
1	5	2	2.01	1	30	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah kegiatan pencegahan dan penindakan penyelenggaraan gangguan Trantibum	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	50 %	50 %	360 Kasus	360 Kasus	6 jenis	6 jenis	1.702.598.300	1.606.542.900	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	50 %	2.445.833.987
				31		Patroli Pengamanan dan Pengawasan	Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah koordinasi dan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan Masyarakat			100 %	100 %			2 jenis	2 jenis				Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman	100 %	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Tar get						
						Sebe lum	Ses uda h	Sebel um	Sesud ah	Seb elu m	Ses uda h	Sebelum	Sesudah									
1	URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		sesuai ketentuan		dan Perlindungan masyarakat												Masyarakat sesuai ketentuan						
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan		Jumlah Pembinaan dan Penegakan disiplin Kode etik Lingkup Tugas Satpl PP dan Linmas		100 %	100 %			1 jeni s	1 jeni s					Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %					
		Persentase satlinmas yang aktif		Jumlah kegiatan Satlinmas dalam penanganan Tibumtranma s		70 %	70 %			3 jeni s	3 jeni s					Persentase satlinmas yang aktif	70 %					
1	5	2	2.0 1	2	3 2	Penindakan Atas Gangguan Ketenterama n dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung Tibumtranma s	Semua Kab/Kota Semua Kecamata n Semua Kelurahan	50 %	50 %	80 Kasus	80 Kasus	100 %	100 %	3.271.699. 000	3.183.525. 000	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikas i	50 %	4.810.420.00 7

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
	Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan																			
		Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan				100 %	100 %										Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan	100 %				
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan				100 %	100 %										Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %				
		Persentase satlinmas yang aktif				70 %	70 %										Persentase satlinmas yang aktif	70 %				
1	5	2	2.0	3	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan								73.076.000	47.487.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	50 %	181.515.125

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
	Tingkat Kabupaten/Kota		Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan														Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan	100 %				
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan														Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %				
			Persentase satlinmas yang aktif														Persentase satlinmas yang aktif	70 %				
1	5	2	2.01	4	34	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan								222.629.000	153.416.400	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	50 %	287.275.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum			Sesudah			Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Umum																		
		Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan				100 %	100 %										Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan	100 %			
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan				100 %	100 %										Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %			
		Persentase satlinmas yang aktif				70 %	70 %										Persentase satlinmas yang aktif	70 %			
1	5	2	2.0	5	3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih			120 Orang	120 Orang			175.282.400	123.161.500	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	50 %	418.605.550

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Tar get					
						Sebe lum	Ses uda h	Sebel um	Sesud ah			Seb elu m		Ses uda h			Sebelum	Sesudah			
1	URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
	dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan				100 %	100 %											Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan	100 %		
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan				100 %	100 %											Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %		
		Persentase satlinmas yang aktif				70 %	70 %											Persentase satlinmas yang aktif	70 %		
1	5	2	2.0 1	6	3 6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan			5 Dok umen	5 Dok umen			188.263.00 0	121.314.2 00	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	50 %	414.617.148
							Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman												Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman	100 %	

Kode							Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
								Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
												Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Tar get		
1																								
						URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
							Masyarakat sesuai ketentuan													n Masyarakat sesuai ketentuan				
							Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan													Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %			
							Persentase satlinmas yang aktif													Persentase satlinmas yang aktif	70 %			
1	5	2	2.0	7	3	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia		Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	50 %	50 %	2006 Unit	2006 Unit				243.637.20 0	134.704.8 00	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum		Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikas i	50 %	2.420.000.00 0
							Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan													Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentrama n Masyarakat sesuai ketentuan	100 %			
							Persentase Perda dan														Persentase Perda dan	100 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Tar get					
						Sebe lum	Ses uda h	Sebel um	Sesud ah			Seb elu m		Ses uda h			Sebelum	Sesudah			
1	URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
		Perkada yang ditegakan															Perkada yang ditegakan				
		Persentase satlinmas yang aktif				70 %	70 %										Persentase satlinmas yang aktif	70 %			
1	5	2	2.0 1	9	3 8	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	50 %	50 %	2 Laporan	2 Laporan			26.899.600	26.899.600	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	50 %	198.478.022
						Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan				100 %	100 %								Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan	100 %	
						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan				100 %	100 %								Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %	
						Persentase satlinmas yang aktif				70 %	70 %								Persentase satlinmas yang aktif	70 %	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Tar get							
						Sebe lum	Ses uda h	Sebel um	Sesud ah	Seb elu m	Ses uda h	Sebelum	Sesudah									
1	URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	5	2	2.0 2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota									1.924.718 .800	1.749.617 .800			806.397.664				
1	5	2	2.0 2	1	3	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kel ompok Masyarakat/Pel aku Usaha/	Jumlah kegiatan sosialisasi Pengawasan dan Penanganan Perda dan Perkada			24 La poran	24 Lap oran	3 J enis	3 Je nis	516.288.00 0	487.418.4 00	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikas i	50 %	234.256.000	
						Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan						100 %	100 %						Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentrama n Masyarakat sesuai ketentuan	100 %		
						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan						100 %	100 %							Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %	
						Persentase satlinmas yang aktif						70 %	70 %							Persentase satlinmas yang aktif	70 %	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Tar get					
1										Sebe lum	Ses uda h	Sebel um	Sesud ah	Seb elu m	Ses uda h	Sebelum	Sesudah							
1	5	2	2.0 2	2	4 0	URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi Pengawasan dan Penanganan Perda dan Perkada	Semua Kab/Kota Semua Kecamata n Semua Kelurahan	50 %	50 %	40 La poran	40 Lap oran	3 J enis	3 Je nis	65.708.800	40.276.80 0	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikas i	50 %	87.752.830	
							Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan					100 %	100 %								Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentrama n Masyarakat sesuai ketentuan	100 %		
							Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan					100 %	100 %									Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %	
							Persentase satlinmas yang aktif					70 %	70 %									Persentase satlinmas yang aktif	70 %	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target							
						Sebe lum	Ses uda h	Sebel um	Sesud ah	Seb elu m	Ses uda h	Sebelum	Sesudah										
1	URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
1	5	2	2.0 2	3	4 1	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Jumlah kegiatan sosialisasi Pengawasan dan Penanganan Perda dan Perkada	Semua Kab/Kota Semua Kecamata n Semua Kelurahan	50 %	50 %	2 Lapor an	2 Lapora n	3 J enis	3 Je nis	1.342.722. 000	1.221.922. 600	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikas i	50 %	484.388.834	
						Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan					100 %	100 %								Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentrama n Masyarakat sesuai ketentuan	100 %		
						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan					100 %	100 %									Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %	
						Persentase satlinmas yang aktif					70 %	70 %									Persentase satlinmas yang aktif	70 %	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
						Sebe lum	Ses uda h	Sebel um	Sesud ah	Seb elu m	Ses uda h	Sebelum	Sesudah					
1	URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
		Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan															Ketertiban Umum dan Ketentrama n Masyarakat sesuai ketentuan	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan				100 %	100 %										Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %
		Persentase satlinmas yang aktif				70 %	70 %										Persentase satlinmas yang aktif	70 %
		Persentase Satlinmas yang aktif				70 5	70 5										Persentase Satlinmas yang aktif	70 %
TOTAL												14.081.54 5.134	13.263.32 5.563			15.489.699. 647		

Sumber : RKPD Perubahan, SIPD 2023

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada RKPD dan atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Renja Tahun 2023 juga dilakukan untuk merespon terjadinya i) kejadian luar biasa seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Kecamatan Pangatikan; ii) kejadian bencana alam seperti hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi; rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Samarang dan Pasirwangi; dukungan kegiatan prioritas nasional diantaranya kegiatan dukungan penanganan stunting di KODIM dan POLRES, pembangunan pasar rakyat Cikajang, pengelolaan Situ Bagendit; iv) pengalokasian gaji PPPK Kesehatan; v) penyesuaian belanja pemenuhan DAU yang diarahkan penggunaannya terutama DAU Bidang Pendidikan dan DAU Bidang Kesehatan; v) penyesuaian atas petunjuk DAK Fisik dan Non Fisik serta adanya kegiatan luncuran dan pergeseran anggaran SKPD.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023	123
--	-----

2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan Renja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023	124
--	-----